

**RENSTRA REVISI**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2020—2024**

**BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Seniman Amri Yahya, Kompleks Taman Budaya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang 30257

Telepon: 0711-7539500, Faksimile: 0711-7539555

Laman: [www.balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id](http://www.balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id); Pos-el: [balaibahasa.sumsel@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasa.sumsel@kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**NOMOR: 039/I5.5/PR.00.02/2022**

Tentang

**RENCANA STRATEGIS**

**BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2020-2024**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020—2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020—2024, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024, yang merupakan dokumen perencanaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini.

KEDUA : Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024 termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan dokumen Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024 dipergunakan sebagai pedoman di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan untuk penetapan Rencana Kerja Balai

Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020—2024.

**KELIMA** : Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024 dapat diubah dan disesuaikan sepanjang :

- a. Terdapat peraturan dan/atau kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
- b. Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan: di Palembang  
Pada Tanggal: 10 Mei 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan



**Drs. Umar Solikhan, M.Hum.**  
NIP 196808081998021001



## KATA PENGANTAR

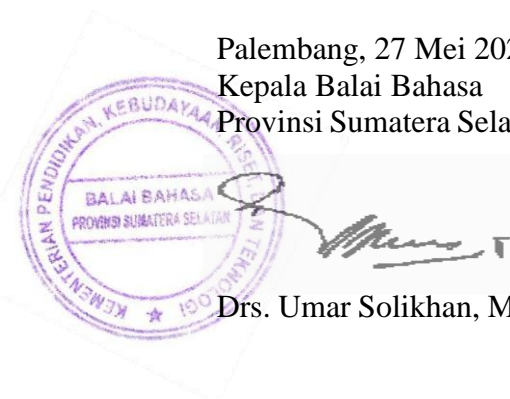


Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020—2024. Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, dan struktur program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020—2024. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena itu yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Sumatera Selatan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan serta evaluasi hasil kerjanya pada 2020—2024 ini mengacu pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan memerlukan proses, kerja keras, integritas, dan komitmen semua pihak untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini.

Palembang, 27 Mei 2022  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....   | 4  |
| BAB I PENDAHULUAN.....   | 3  |
| 1.1 Kondisi Umum.....  | 4  |
| 1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024 ..... | 7  |
| 1.3 Permasalahan dan Potensi .....   | 9  |
| BAB II .....   | 12 |
| VISI, MISI, DAN TUJUAN .....   | 12 |
| BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN .....   | 12 |
| 2.1 Visi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan .....  | 12 |
| 2.2 Misi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan .....  | 12 |
| 2.3 Tujuan .....   | 13 |
| 2.4 Sasaran Kegiatan .....   | 13 |
| BAB III .....  | 15 |
| ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....                     | 15 |
| 3.1 Arah Kebijakan .....   | 15 |
| 3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....  | 15 |
| 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdikbudristek .....  | 16 |
| 3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa .....                | 17 |
| 3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.....                  | 29 |
| 3.2 Kerangka Regulasi .....  | 30 |
| 3.3 Kerangka Kelembagaan .....   | 31 |
| 3.3.1 Struktur Organisasi .....  | 32 |
| 3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia .....  | 32 |
| 3.3.3 Reformasi Birokrasi.....   | 33 |
| 3.3.4 Pemenuhan Sarana Prasarana .....   | 34 |
| BAB IV .....   | 35 |
| TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....  | 35 |
| 4.1 Target Kinerja .....   | 35 |
| 4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021 .....  | 35 |
| 4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024 .....  | 36 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan .....   | 36 |
| BAB V .....  | 39 |
| PENUTUP .....  | 39 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Palembang. Provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Sumatera Selatan sekarang, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1–4° Lintang Selatan dan 102–106° Bujur Timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km<sup>2</sup>. Secara administratif Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota.

Penduduk Sumatera Selatan selain penutur bahasa Indonesia, sebagian besar penduduk adalah suku Komerling, Jawa, Palembang, Gumai, Semendo, Lintang, Kayu Agung, Lematang, Ogan, Pasemah, Sekayu, Rawas, dan Banyu Asin yang bertutur menggunakan bahasa Melayu, Jawa, Komerling, Lematang, Ogan, dan Pedamaran. Jumlah penutur bahasa daerah di Sumatera Selatan Dari hasil pemetaan pada 2007 ada ribuan penutur yang dapat dikategorikan sebagai bahasa resmi yang dipakai di Sumatera Selatan. Bahasa Melayu 56 ribu penutur, Bahasa Kayuagung 6.800 penutur, Bahasa Ogan 33 ribu penutur, Bahasa Lematang 34 ribu penutur, Bahasa Komerling 12 ribu penutur, Bahasa Pedamaran 6 ribu penutur, dan Bahasa Jawa 3.330 penutur dari jumlah penutur tersebut masih cukup banyak dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Dari kondisi tersebut perlu adanya upaya melestarikan keberadaan bahasa daerah di Sumatera Selatan karena dampak dari perkembangan zaman dimungkinkan pergeseran antar budaya dan mengancam keberadaan bahasa daerah.

Bidang Sastra Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa jenis sastra lisan dengan menggunakan bahasa daerah seperti Njang Panjang dan Bujang Jelihim di Ogan Komerling Ulu (OKU), Jelihiman di Ogan Ilir (OI), Senjang di Musi Banyuasin (MUBA), Geguritan, Tadut, Betadur, dan Tangis Ayam yang berkembang di Lahat, Nyanyian Panjang dan Bujang Jemaran di Ogan Komerling Ilir (OKI). Dilihat dari perkembangan sastra lisan di provinsi Sumatera Selatan seiring berjalannya waktu belum banyak dikenal masyarakat secara umum hanya kalangan masyarakat dan komunitas tertentu yang mengetahui sehingga perlu penanganan dan perlindungan untuk melestarikan sastra lisan.



Melihat permasalahan tersebut di atas Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai program dan kegiatan yang mendorong pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 078 Tahun 2015, Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu, renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024 harus mengacu dan merupakan penjabaran visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

## 1.1 Kondisi Umum

### a. Capaian Tahun 2015—2019

Pencapaian Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Sumatera Selatan kurun waktu 2015—2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja Kegiatan |   | 2015         | 2016          | 2017          | 2018          | 2019         |
|-------------------|--|----------------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.                | Meningkatnya Kosa Kata Bahasa Indonesia  | 1.                         | Jumlah Kosa Kata Indonesia                            | 500 kosakata | 1000 kosakata | 1200 kosakata | 1000 kosakata | 500 kosakata |
| 2.                | Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan.                         | 1.                         | Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra                   | 4 naskah     | 8 naskah      | 5 naskah      | 5 naskah      | 5 naskah     |
|                   |  | 2.                         | Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra             | 2 terbitan   | 2 terbitan    | 2 terbitan    | 2 terbitan    | 2 terbitan   |
| 3.                | Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.                         | Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 4 bahan      | 4 Bahan       | 12 bahan      | 4 bahan       | 4 bahan      |

|    |   |    |  |            |            |            |            |            |
|----|---|----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4. | Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra | 1. | Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra | 750 orang  | 1000 orang | 1200 orang | 800 orang  | 1400 orang |
|    |   | 2. | Jumlah Generasi Muda yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra                                   | 800 orang  | 1400 orang | 700 orang  | 700 orang  | 500 orang  |
| 5. | Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali  | 1. | Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya   | 17 lembaga | 34 lembaga | 34 lembaga | 17 lembaga | 10 lembaga |
|    |   | 2. | Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan Bahasanya   | 5 lembaga  | 5 lembaga  | 10 lembaga | 20 lembaga | 10 lembaga |

Selama periode tahun 2015—2019, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan sejumlah kegiatan, yakni melaksanakan penelitian kebahasaan berupa pengambilan data kosakata dengan capaian 4.200 kosakata. Penelitian kebahasaan dan kesastraan dengan menghasilkan 27 naskah. Publikasi ilmiah dengan capaian 10 terbitan dalam bentuk jurnal ilmiah. Bahan ajar bahasa dan sastra dengan capaian 26 bahan ajar. Jumlah tenaga profesional terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra dengan capaian 5.150 orang dengan kualitas meningkat setelah dilakukan pembinaan sebesar 95%. Capaian generasi muda terbina dalam penggunaan Bahasa dan sastra sebesar 4.100 dengan kualitas meningkat sebesar 90%. Capaian Badan publik terkendali sebesar 112 dengan jumlah peningkatan mutu sebesar 75% dan yang diusulkan untuk penilaian tingkat nasional 3 lembaga tetapi belum memperoleh nominasi 10 besar. Capaian penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik bagi lembaga swasta sebesar 50 lembaga jumlah peningkatan mutu sebesar 45%.

Dalam dokumen RPJMN 2015—2019, terdapat dua prioritas nasional (PN) yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu PN 3 (Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing) dan PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan). Prioritas Nasional 3 dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan (PP). Dua dari tujuh PP tersebut

merupakan prioritas pembangunan bidang pendidikan, yaitu PP 4 (Pemerataan layanan pendidikan berkualitas) dan PP 7 (Peningkatan produktivitas dan daya saing). Sementara itu, prioritas nasional 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dijabarkan dalam empat program prioritas. Dua di antara empat PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan dan kebahasaan, yaitu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (PP 2) dan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas (PP 4).

Pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan, merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Fokus pembangunan dalam bidang ini diarahkan pada empat titik strategis, yaitu (1) perencanaan bahasa dan implementasinya, (2) pembangunan budaya literasi, (3) pemajuan sastra, dan (4) pengembangan sistem perbukuan. Empat titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Keempat titik strategis dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan di atas perlu diejawantahkan dalam dokumen rencana strategis yang memuat arah kebijakan dan perangkat pendukung yang diperlukan, baik dukungan anggaran maupun regulasi. Dokumen tersebut harus memuat langkah konkret yang ditempuh selama kurun waktu tertentu sehingga tujuan pembangunan tercapai melalui program yang tepat sasaran dan anggaran yang efisien. Untuk kepentingan itulah Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020—2024 ini disusun.

#### b. Capaian Tahun 2020—2021

Pencapaian Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Sumatera Selatan untuk kurun waktu 2020—2021 terangkum dalam tabel berikut ini.

| No | Sasaran Strategis  | No | Indikator Kinerja Kegiatan                       | 2020          | 2021          | Kumulatif Renstra 2020—2024 |               |
|----|--|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|    |  |    |  |               |               | Target                      | Realisasi     |
| 1. | Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia                | 1. | Jumlah KosaKata Bahasa Indonesia                 | 1000 kosakata | 1000 kosakata | 5400 kosakata               | 2000 kosakata |
| 2. | Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik | 1. | Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina | 140 lembaga   | 154 lembaga   | 460 lembaga                 | 294 lembaga   |

|    |  |    |  |           |           |            |            |
|----|--|----|--|-----------|-----------|------------|------------|
| 3. | Meningkatnya Jumlah penutur Bahasa Terbina   | 1. | Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra | 995 orang | 780 orang | 4850 orang | 1775 orang |
| 4. | Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah                     | 1. | Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Perlindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah     | 11 orang  | 45 orang  | 861 orang  | 56 orang   |
|    |  | 2. | Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Perlindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah     | 50 orang  | 40 orang  | 950 orang  | 90 orang   |
|    |  | 3. | Jumlah Produk Kesastraan Terkembang  | 1 produk  | 5 produk  | 7 produk   | 6 produk   |
| 5. | Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangandan Pembinaan Bahasa | 1. | Predikat SAKIP Satker Minimal BB   | A         | A         | BB         | A          |
|    |  | 2. | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91                                | 93,89     | 87,13     | 92         | 90,51      |

## 1.2 Pokok-Pokok Perubahan dalam Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024

Mengacu pada arahan BPP Bahasa dalam rangka penyelarasan dokumen Renstra agar mampu menjawab tantangan perubahan, maka dalam dokumen ini dilakukan perubahan sebagai berikut.

| No.   | Struktur<br>(Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019) | Renstra   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | Semula  | Menjadi   |
| 1.  | BAB 1 Pendahuluan                                  |   |   |
|   | 1.1 Kondisi Umum                                   | Capaian 2015—2019   | 1. Capaian 2015—2019<br>2. Capaian 2020—2021  |
|   | 1.2 Permasalahan dan Potensi                       | Permasalahan dijelaskan secara umum berdasarkan sasaran program | Permasalahan diurai berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman yang dianalisis menggunakan pendekatan SWOT |
| Mencantumkan Paradigma Pembangunan Kebahasaan dan |  | Dihapus   |   |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   | Kesastraan   |  |
| 2. | <b>BAB II Visi, Misi, dan Tujuan</b>  |  |  |
|    |   | Mencantumkan visi BPP Bahasa yang diturunkan menjadi visi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan | Tidak ada perubahan  |
|    |   | Mencantumkan misi dengan narasi serupa dengan visi   | Tidak ada perubahan  |
|    |   | Terdapat tata nilai kelembagaan  | Dihapus  |
| 3. | <b>BAB III Arah Kebijakan, Strategis, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan</b> |  |  |
|    |   | Menyajikan arah kebijakan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan secara umum.                    | Menambahkan arah kebijakan secara nasional.  |
|    |   | Penyajian strategi pelaksanaan program dilakukan secara umum                                     | Strategi pelaksanaan program disajikan dengan program berbasis Kelompok Kepakaran dan layanan Profesional (KKLP)   |
| 4. | <b>BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Kelembagaan</b>                                 |  |  |
|    |   | Target Kinerja disajikan dalam periode 2020—2024   | Target Kinerja di sajikan menjadi dua periode:<br>1. Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021<br>2. Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024   |
|    |   | Kerangka Pendanaan disajikan dalam periode 2020—2024   | Kerangka Pendanaan di sajikan menjadi tiga periode:<br>1. Periode TA 2020<br>2. Periode TA 2021<br>3. Periode TA 2022-2024   |
| 5. | <b>BAB V Penutup</b>  |  |  |
|    |   | -  | Tidak ada perubahan  |
| 6. | <b>Lampiran</b>   |  |  |
|    |   | -  | 1. Matrik Perubahan (Semula-Menjadi) Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan<br>2. Matrik Definisi Operasional dan Metode Perhitungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan<br>3. Cascading PK Tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan |

### 1.3 Permasalahan dan Potensi

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, teridentifikasi sebanyak 4 faktor yang tersebar pada empat klaster, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Berikut ini adalah keseluruhan faktor tersebut.

#### A. Faktor Internal

##### 1) Kekuatan

- a) Tersedianya dukungan regulasi (landasan hukum) kebahasaan dan kesastraan yang lengkap
- b) Tiga puluh UPT yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat bekerja bersama dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa
- c) Satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bahasa dan sastra di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan
- d) Memiliki SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kebahasaan kepada lembaga/masyarakat
- e) Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan kebahasaan dan kesastraan yang memadai baik yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan maupun yang disediakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

##### 2) Kelemahan

- a) Belum terimplementasinya regulasi kebahasaan dan kesastraan secara menyeluruh
- b) Jumlah SDM yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan lembaga/masyarakat terhadap layanan kebahasaan dan kesastraan
- c) Masih ada SDM yang belum memenuhi kualifikasi untuk memberikan layanan kesastraan kepada lembaga/masyarakat
- d) Belum lengkapnya data bahasa dan sastra daerah di Sumatera Selatan

#### B. Faktor Eksternal

##### 1) Peluang

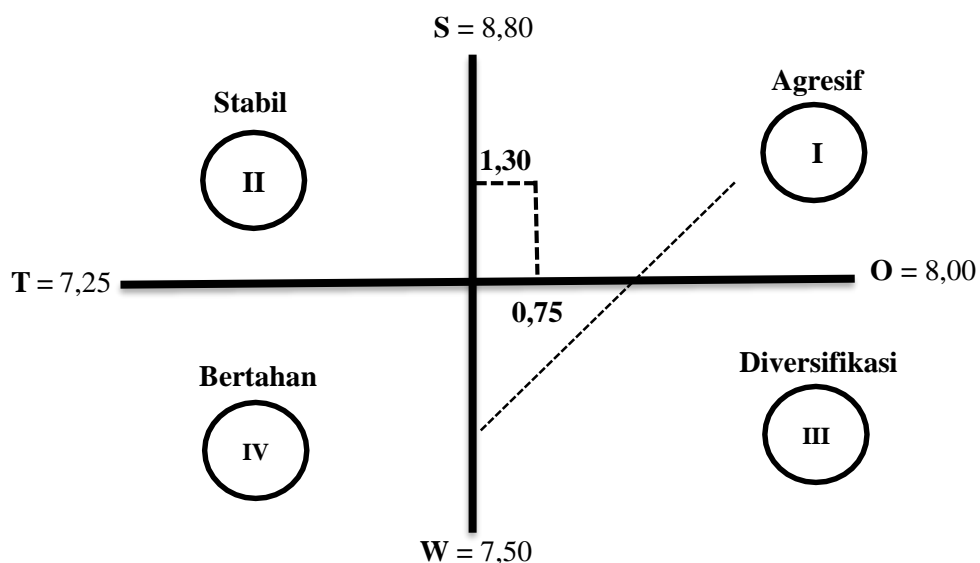
- a) Jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam perencanaan wibawa bahasa
- b) Dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia

- c) Adanya kemajuan teknologi yang pesat memudahkan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan produk kebahasaan dan kesastraan melalui media informasi
- d) Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
- e) Layanan UKBI yang tersedia dan terbuka untuk semua kalangan

2) Tantangan

- a) Pemerintah daerah sebagai pelaku utama tidak menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas
- b) Dominasi budaya asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra
- c) Koordinasi dengan penduduk selaku informan bahasa daerah setempat cukup sulit dilaksanakan
- d) Layanan UKBI tidak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Sumatera Selatan karena koneksi internet di sebagian wilayah tidak stabil

Terhadap keseluruhan faktor internal dan eksternal ditentukan nilai urgensi, nilai dukung, dan nilai keterkaitan antarfaktor terhadap ketercapaian misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hasil akhir diperoleh dari jumlah total dari bobot urgensi, bobot dukung, dan bobot keterkaitan. Dari analisis keseluruhan, diperoleh nilai akhir untuk **kekuatan** sebesar **8,80**, **kelemahan** sebesar **7,50**, **peluang** sebesar **8,00**, dan **tantangan** sebesar **7,25**.





Penentuan faktor kunci keberhasilan (FKK) pencapaian misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan faktor eksternal dengan memperhatikan nilai bobot total dari setiap faktor pada analisis SWOT di atas. Dari faktor kunci keberhasilan yang ada, kemudian ditetapkan masalah dan potensi prioritas yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini diidentifikasi masalah prioritas yang didasarkan pada evaluasi faktor internal dan faktor eksternal di atas.

### **Masalah**

- a) Pemerintah daerah sebagai pelaku utama tidak menjadikan program perlindungan bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas
- b) Dominasi budaya asing yang berimplikasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra
- c) Koordinasi dengan penduduk selaku informan bahasa daerah setempat cukup sulit dilaksanakan
- d) Layanan UKBI tidak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Sumatera Selatan karena koneksi internet di sebagian wilayah tidak stabil

### **Strategi**

- a) Optimalisasi menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah daerah setempat agar program perlindungan bahasa dan sastra daerah dapat terlaksana dengan baik
- b) Merangkul komunitas-komunitas bahasa dan generasi muda untuk ikut serta dalam program Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
- c) Memperkuat koordinasi dengan penduduk daerah yang di ambil data bahasa dan sastranya
- d) Menyediakan laboratorium beserta akomodasi untuk peserta UKBI.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **2.1 Visi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan**

sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sejalan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan mendukung visi Kemendikbudristek tahun 2020-2024 melalui bahasa dan sastra. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

*“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.”*

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.*

##### **2.2 Misi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan**

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

### 2.3 Tujuan

Tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkaitan dengan penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024. Tujuan itu *Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan*.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan serta untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai. Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2024). Target keberhasilan tujuan strategis berdasarkan indikator tujuan selamaperiode renstra 2020 – 2024 ditetapkan sebagai berikut.

| Tujuan   | Indikator Kinerja Tujuan   | Satuan          | 2024 |
|--|--|-----------------|------|
| Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan  | Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya | %               | 60   |
|  | Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya          | %               | 75   |
| Meningkatnya kelestarian bahasa daerah   | Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya                                 | <i>Indeks</i>   | 0.65 |
| Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi | Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan                            | <i>Predikat</i> | A    |

### 2.4 Sasaran Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menyusun sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut.

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  |
|--|---|
| Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra                                    | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra  |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan |

|   |   |
|---|---|
| Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                      | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                              |
|   | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                              |
| Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA  | Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing(BIPA)                    |
| Tersedianya produk diplomasi bahasa   | Jumlah produk penerjemahan  |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah | Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah                       |
| Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan                          | Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Selatan                                  |
|   | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Sumatera Selatan |

Pencapaian sasaran strategis periode tahun 2020—2024 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut.

| Kode           | SK/IKK  | Satuan   | Target Renstra |       |       |
|----------------|---|----------|----------------|-------|-------|
|                |   |          | 2022           | 2023  | 2024  |
| <b>SK 1</b>    | Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra                                     |          |                |       |       |
| <b>IKK 1.1</b> | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra  | Produk   | 2              | 3     | 3     |
| <b>SK 2</b>    | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan  |          |                |       |       |
| <b>IKK 2.1</b> | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | Orang    | 408            | 1.000 | 1.000 |
| <b>SK 3</b>    | Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                            |          |                |       |       |
| <b>IKK 3.1</b> | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                                      | Lembaga  | 34             | 45    | 45    |
| <b>IKK 3.2</b> | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                                      | Lembaga  | 30             | 100   | 100   |
| <b>SK 4</b>    | Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA  |          |                |       |       |
| <b>IKK 4.1</b> | Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing(BIPA)                            | Lembaga  | 5              | 5     | 5     |
| <b>SK 5</b>    | Tersedianya produk diplomasi bahasa   |          |                |       |       |
| <b>IKK 5.1</b> | Jumlah produk penerjemahan  | Produk   | 3              | 5     | 5     |
| <b>SK 6</b>    | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah       |          |                |       |       |
| <b>IKK 6.1</b> | Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah                               | Orang    | 22             | 100   | 100   |
| <b>SK 7</b>    | Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan                                |          |                |       |       |
| <b>IKK 7.1</b> | Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Selatan  | Predikat | BB             | BB    | BB    |
| <b>IKK 7.2</b> | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Sumatera Selatan         | Nilai    | 91             | 92    | 92    |

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan**

##### **3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020—2024 diselenggarakan melalui tujuh agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Ketujuh agenda pembangunan tersebut ialah.

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan di atas, Kemendikudristek berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda 3, 4, dan 7. Ketiga agenda tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Sementara itu, dari tiga agenda pembangunan yang didukung oleh Kemendikbudristek, terdapat dua agenda yang disokong oleh unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan agenda pembangunan nasional disajikan dalam tabel berikut.

| No.   | Program dan Kegiatan                           | Arah Kebijakan dan Strategi Nasional   | Sasaran Strategi   |
|---|--|--|--|
| <b>A</b> Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                           |  |  |  |
| 1.  | Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas | Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra. | SS 3: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.   |
| <b>B</b> Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik |  |  |  |
| 1.  | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola            | 1. Penguatan manajemen aparatur sipil negara   | SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. |
|   |  | 2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis  |  |
|   |  | 3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja  |  |
|   |  | 4. Transformasi pelayanan publik   |  |

### 3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdikbudristek

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras. Secara garis besar, Kemendikbudristek mengusung platform Merdeka Belajar sebagai cara untuk mencapai hal tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Kemendikbudristek mengarahkan fokus kebijakan pada lima hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan
  2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan
  3. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
  4. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
  5. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
- Berkaitan dengan hal di atas, pada butir pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan,

berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek.

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Strategi yang dikembangkan secara khusus untuk mencapai kondisi yang diinginkan

oleh Kemendikbudristek terurai dalam tabel berikut ini.

| No.  | Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi  |
|--|---|
| Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan |   |
| 1.   | Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam Pendidikan  |
| a.   | meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar;   |
| b.   | meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu;   |
| c.   | Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran;  |
| d.   | mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana Pendidikan karakter;   |
| e.   | mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik;  |
| f.   | meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal  |
| g.   | memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.  |
| 2.   | Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional   |
| a.   | menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia;   |
| b.   | meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia                      |
| c.   | meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (friends of Indonesia), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri. |
| 3  | Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan  |
| a.   | memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;  |
| b.   | melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;  |
| c.   | Mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia   |
| d.   | Mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  |
| e.   | memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;  |
| f.   | reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan  |
| g.   | meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan   |
| h.   | meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah  |
| i.   | mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah   |
| j.   | mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk perlindungan bahasa dan sastra daerah  |

### 3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.



### 3.1.3.1 Arah Kebijakan BPP Bahasa

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, terutama dalam mewujudkan pemajuan dan pelestarian bahasan dan kebudayaan. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

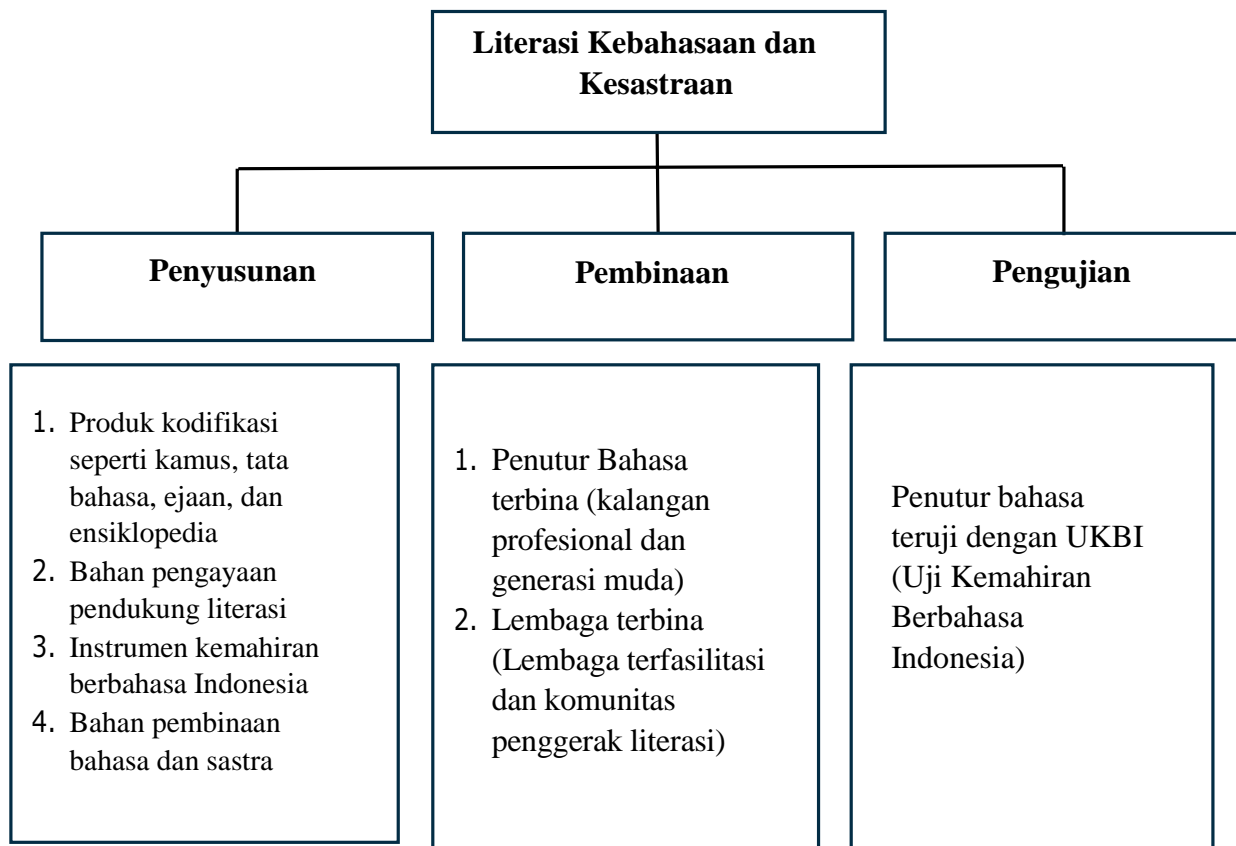
1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.



**Fokus kebijakan pertama** ialah penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia.

Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembina lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.



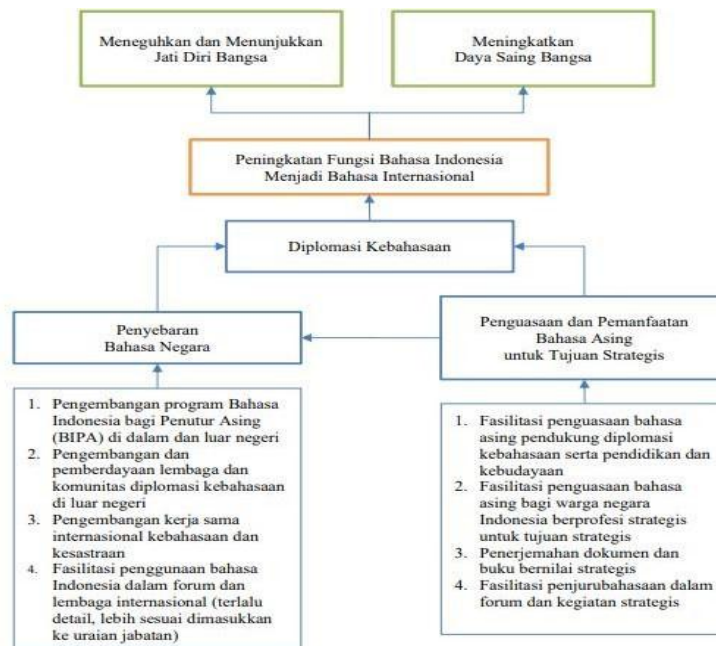
**Fokus kebijakan kedua** ialah pelindungan bahasa dan sastra daerah. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas perlindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

**Fokus kebijakan ketiga** berkaitan dengan internasionalisasi bahasa Indonesia. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia



Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Badan Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.

### 3.1.3.2 Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesastraan, BPP Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform **Kelompok Keahlian dan Layanan Profesional (KKLP)**. Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan BPP Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif dengan penjelasan sebagai berikut.

**a. Fungsional**

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

**b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)**

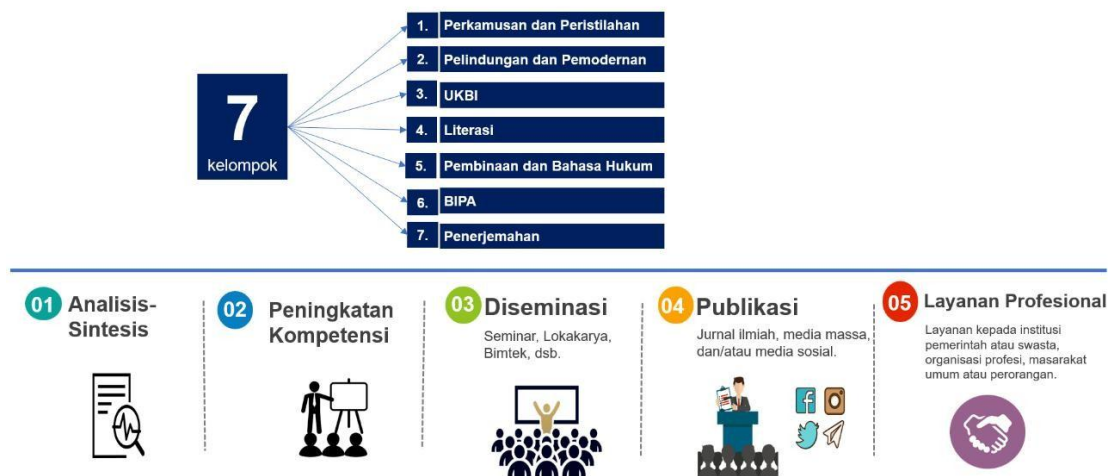
Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

**c. Holistik-Integratif**

Melalui prinsi ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam ‘satu atap-satu rangkaian’ mulai dari kegiatan (1) analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Berdasarkan jenis kepakaran yang ada di BPP Bahasa, terdapat tujuh kelompok kepakaran dan layanan profesional, yaitu (1) KKLP Perkamusan dan Peristilahan, (2) KKLP Pelindungan dan Pemoderna, (3) KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (4) KKLP Literasi, (5) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, (6) KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), dan (7) KKLP Penerjemahan.

**Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional**



Selanjutnya, dengan mengacu pada tiga agenda utama BPP Bahasa, KKLP bekerja di bawah koordinasi satuan kerja pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut.

| No. | Bidang  | KKLP   |  | Pengampu  |   |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1.  | Literasi Kebahasaan dan Kesastraan  | a.   | Perkamusan dan Peristilahan                                      | Pusbanglin  |   |
|     |   | b.   | Literasi   | Pusbin  |   |
|     |   | c.   | Pembinaan dan Bahasa Hukum                                       | Pusbin  |   |
|     |   | d.   | Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)                         | Pusbin  |   |
| 2.  | Pelindungan Bahasa Daerah   | a.   | Pelindungan dan Pemodernan                                       | Pusbanglin  |   |
| 3.  | Internasionalisasi Bahasa Indonesia   | a.   | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)                       | Pustanda  |   |
|     |   | b.   | Penerjemahan   | Pustanda  |   |
| No. | Arah Kebijakan Nasional   | Arah Kebijakan Kemendikbudristek   | Arah Kebijakan BPP Bahasa  | Strategi  | Pelaksana   |
| 1.  | Peningkatan budaya literasi   | Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;                            | Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan                     | Meningkatkan kualitas program kebahasaan dan kesastraan melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) | KKLP Perkamusan dan Peristilahan KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum KKLP Literasi KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia |
| 2.  | Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra | Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional; | Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional |   | KKLP BIPA<br>KKLP Penerjemahan  |
|     |   | Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.  | Pelindungan bahasa daerah  |   | KKLP<br>Pelindungan dan Pemodernan  |

### 3.1.3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.

|                                     | 2022  | 2023  | 2024   |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Literasi Kebahasaan dan Kesastraan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cetak-kirim buku dan pendampingan ke wilayah 3T</li> <li>2. UKBI Adaptif Merdeka</li> <li>3. Halo Bahasa; Sipebi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan pemerintah untuk komunitas</li> <li>2. Kongres Bahasa Bahasa Indonesia XII</li> </ol>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan lembaga</li> <li>2. Pendampingan pemanfaatan buku</li> </ol> |
| Pelindungan Bahasa Daerah           | Merdeka Belajar Eps-17: Revitalisasi Bahasa Daerah (12 provinsi)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.3.4 MB-17: RBD (20 provinsi )</li> <li>3.1.3.5 Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional</li> </ol>       | Merdeka Belajar Eps -17: Revitalisasi Bahasa Daerah (34 provinsi)  |
| Internasionalisasi Bahasa Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi lembaga BIPA</li> <li>2. Penerjemahan</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta jalan penginternasionalan BI</li> <li>2. Fasilitasi lembaga BIPA</li> <li>3. Penerjemahan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi lembaga BIPA</li> <li>2. Penerjemahan</li> </ol>            |

Pada fokus kebijakan pertama (literasi kebahasaan dan kesastraan), terdapat prioritas yang dikerjakan tiap tahun. Pada tahun 2022, BPP Bahasa mencetak dan mengirimkan buku pengayaan sebanyak 12.887.162 eksemplar yang didistribusikan ke 13.572 sasaran (PAUD dan SD) di wilayah 3T. Pencetakan dan pengiriman buku pengayaan dilanjutkan dengan pendampingan pemanfaatan buku. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 dan tambahan anggaran dari BA BUN. Pada tahun 2022 juga diluncurkan aplikasi-aplikasi kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti superaplikasi Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia). Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Dalam rangka mendukung penguatan literasi, pada tahun 2023 terdapat agenda prioritas berupa pemberian **bantuan pemerintah untuk komunitas kebahasaan dan kesastraan**, termasuk komunitas literasi. Komunitas-komunitas tersebut merupakan wahana berkarya bagi para pegiat bahasa dan sastra. Dari



komunitas tersebut lahir para penulis-penulis yang mampu menginspirasi generasi muda agar mampu berkarya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan komunitas sastra bervariasi. Sebagian di antaranya sangat potensial dan prospektif dalam menggembleng bibit-bibit penulis muda. Untuk komunitas yang berpotensi menjadi wahana kreatif itulah, pemerintah perlu mengulurkan tangan agar bakat-bakat yang ada tidak hilang karena kurangnya sarana, prasarana, maupun kegiatan. Peran pemerintah dalam rangka memberdayakan komunitas-komunitas seperti ini sangat diharapkan sehingga komunitas dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2023 juga terdapat agenda penting, yaitu **Kongres Bahasa Indonesia XII**. Kongres Bahasa Indonesia (KBI)

merupakan forum akbar kebahasaan yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun. Kongres pertama dilaksanakan di Surakarta pada tahun 1938, sedangkan kongres terakhir dilaksanakan di Jakarta



pada tahun 2018. Dalam forum ini dibahas perkembangan mutakhir ilmu kebahasaan dan kesastraan. Dari forum ini dihasilkan rekomendasi yang menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan kebahasaan dan kesastraan.

Sementara itu, penguatan literasi pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi layanan kebahasaan, terutama pemantapan produk kodifikasi bahasa, pembinaan intensif terhadap lembaga pengguna bahasa, perluasan pengguna UKBI Adaptif Merdeka, dan pendampingan SD dan PAUD dalam pemanfaatan buku bacaan.

Pada **fokus kebijakan kedua (pelindungan bahasa daerah)**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah diperluas wilayahnya, dari 12 provinsi (tahun 2022) menjadi 20 provinsi (tahun 2023) dan 34 provinsi (tahun 2024). Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, terdapat agenda peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (*International Mother Language Day*). Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 Februari setiap tahun. Peringatan itu menandai kepedulian warga dunia terhadap keberadaan bahasa daerah yang kian lama kian mengkhawatirkan. Bahkan, secara khusus PBB menetapkan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah untuk menggerakkan semua pemangku kepentingan agar bersama-sama melestarikan bahasa daerah. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada tahun 2023 Indonesia bersama dengan UNESCO akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Kegiatan diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Puncak peringatan diagendakan di markas UNESCO di Paris, Prancis dengan menampilkan Mendikbudristek sebagai pembicara kunci pada forum tersebut.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga (internasionalisasi bahasa Indonesia)**, terdapat agenda prioritas berupa penyusunan peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa.

Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu (1) Penyediaan gedung/kantor bagi UPT, (2) Penyelesaian regulasi tentang jabatan fungsional Widyabasa, (3) Peningkatan kompetensi pegawai, dan (4) Penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, dan (5) Evaluasi program 2020—2024 (termasuk evaluasi KBI).

Berkaitan dengan penyediaan gedung/kantor bagi UPT (balai/kantor bahasa), prioritas pertama ditujukan pada UPT yang telah memperoleh izin prinsip dari Presiden untuk membuka blokir moratorium pembangunan gedung/kantor. Dukungan pendanaan bagi UPT-UPT tersebut perlu diprioritaskan pada tahun 2023. Bagi UPT lain, upaya penyediaan tanah/gedung/kantor dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan data, baik izin prinsip maupun RKBMN. Pada akhir periode Renstra, diharapkan semua UPT telah menempati gedung/kantor yang layak karena UPT tersebut merupakan garda terdepan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa di masyarakat. Satuan-satuan kerja tersebut mengemban berbagai amanat regulasi. Luas wilayah kerja tiap UPT juga sangat luas (satu

sampai dua provinsi). Unit-unit tersebut merupakan wajah BPP Bahasa (Kemendikbudristek) di daerah sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. Dengan fasilitas yang memadai, UPT tersebut dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat dan lebih bermartabat sebagai representasi Kemendikbudristek.

Berkaitan dengan jabatan fungsional Widyabasa, perlu ditempuh langkah ekstra untuk menyelesaikan semua regulasi yang diperlukan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi kemunculan jabatan fungsional Widyabasa sebagai salah satu strategi dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme SDM yang memiliki kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inisiasi tentang jabatan fungsional Widyabasa merupakan langkah strategis untuk mengisi rumpang nama kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dari segi pelaksanaan tugas dan kepakarannya sebenarnya telah lama diemban oleh pegawai di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui penetapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola jabatan fungsional Widyabasa. Secara khusus jabatan fungsional Widyabasa mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang meliputi Widyabasa Ahli Pertama, Widyabasa Ahli Muda, Widyabasa Ahli Madya, dan Widyabasa Ahli Utama.

Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan organisasi atas kompetensi yang harus dimiliki para pegawai.



Selanjutnya, pengembangan kompetensi didasarkan pada peta kompetensi yang disusun tersebut. Pengembangan kompetensi ditujukan bagi pegawai teknis yang tergabung dalam KKLK maupun pegawai administratif yang mendukung terselenggaranya roda organisasi.

Berkaitan dengan penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, perlu ditempuh langkah-langkah sistematis dalam mewujudkan indeks yang akan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang kebahasaan ini. Penyusunan indeks diagendakan pada tahun awal tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ketika menyusun rencana strategis pada periode 2025--2029.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2020—2024. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kongres bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Momentum akhir Renstra tahun 2024 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

### **3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan**

Kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi berikut ini.

- 3.1.3.6 Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.
- 3.1.3.7 Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- 3.1.3.8 Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai ekonomi bahasa dan sastra di daerah.
- 3.1.3.9 Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud pembinaan bahasa dan sastra di daerah.

Bahasa Sumatera selatan sebagai UPT Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa

melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan strategi pelaksanaan program dengan membentuk Kelompok Keahlian dan Layanan Profesional (KKLP) dengan pola kerja yang bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif.

KKLP bekerja di bawah koordinasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada agenda utama satker yang terangkum sebagai berikut.

| No. | Bidang                              | KKLP | Satker Pengampu                            |            |
|-----|-------------------------------------|------|--|------------|
| 1.  | Literasi Kebahasaan dan Kesastraan  | a.   | Perkamusan dan Peristilahan                | Pusbanglin |
|     |                                     | b.   | Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)   | Pusbin     |
|     |                                     | c.   | Literasi                                   | Pusbin     |
|     |                                     | d.   | Pembinaan dan Bahasa Hukum                 | Pusbin     |
| 2.  | Internasionalisasi Bahasa Indonesia | a.   | Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) | Pustanda   |
|     |                                     | b.   | Penerjemahan                               | Pustanda   |
| 3.  | Pelindungan Bahasa dan Sastra       | a.   | Perlindungan dan Pemodernan                | Pusbanglin |

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| NO. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan  |
|-----|--|--|
| 1.  | Permendikbud tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia       | Pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2019, tentang Penggunaan Bahasa Indonesia   |
| 2.  | Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah | 1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 48 Tahun 2018<br>2. Penguatan kebijakan Balai Bahasa dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra |
| 3.  | Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Daerah                 | 1. Pelaksanaan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2009, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019<br>2. Penguatan kebijakan Balai Bahasa dalam Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia di Daerah   |
| 4.  | Peraturan Kepala Badan   | Acuan pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah, Prosedur Operasional Standar  |

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

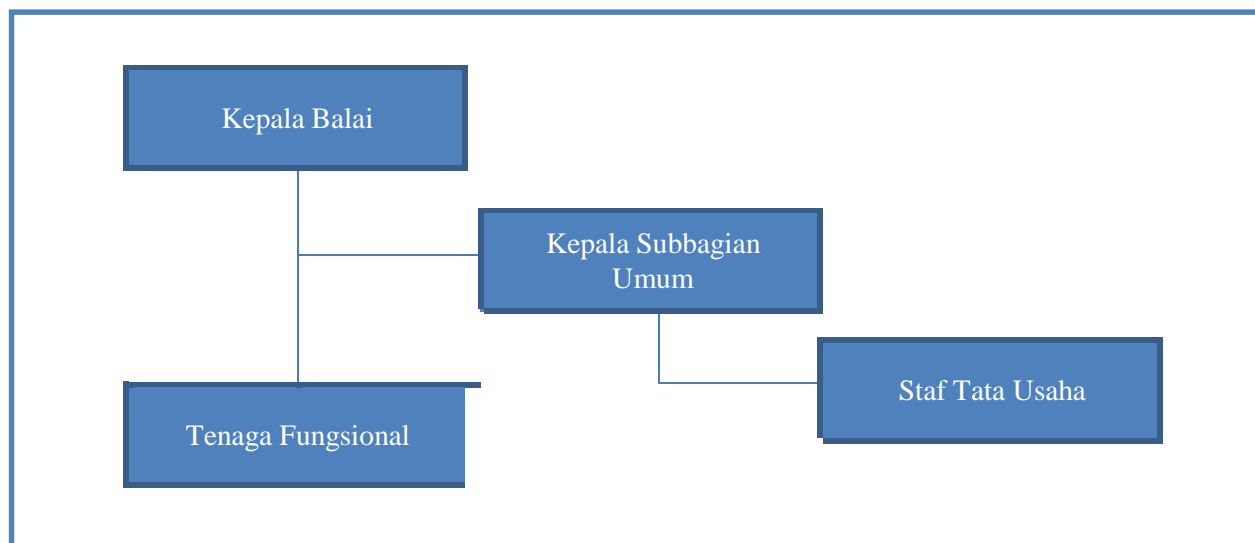
Dalam rangka menjamin keterlaksanaan program Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan diperlukan kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan itu mencakupi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, untuk:

- 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan program-program sesuai dengan fungsi dan visi/misi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi untuk menghindari ketumpangtindihan fungsi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; dan
- 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme SDM.



### 3.3.1 Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.



Untuk memperjelas bagan organisasi di atas, berikut ini tabel penanggung jawab program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

| Kode Program | Program/Kegiatan  | Penanggung Jawab |
|--------------|---|------------------|
| 2021         | Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra   | Kepala Balai     |
| 2022         | Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra  | Kepala Balai     |
| 6702         | Kegiatan Penguatan dan Diplomasi Kebahasaan   | Kepala Balai     |
| 2020         | Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa dan Sastra | Kasubbag. Umum   |

### 3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan saat ini didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 40 orang. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengharuskan semua pejabat fungsional peneliti berpindah ke BRIN. Jumlah tersebut terdiri dari dua orang pejabat struktural, dua puluh lima orang pejabat fungsional, dan tiga belas orang pelaksana. Dari tingkat pendidikan, terdapat 16 orang dengan tingkat pendidikan S-2, 14 orang untuk tingkat pendidikan S-1, 3 orang untuk pendidikan D-3, 6 orang dengan tingkat pendidikan SLTA, dan 1 orang untuk tingkat pendidikan SLTP. Sedangkan dari pangkat/golongan, terdapat 1 orang pegawai di golongan IV, 33 orang di golongan III, dan 6 orang di golongan II.

### 3.3.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) periode 2020—2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Deregulasi Kebijakan
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- d. Penataan Tata Laksana
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- f. Penguatan Akuntabilitas
- g. Penguatan Pengawasan

#### h. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dari sisi sumber daya manusia, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan melakukan peningkatan kompetensi secara bertahap bagi seluruh pegawai. Dengan adanya pengelompokan kepakaran diharapkan kebutuhan dan pelaksanaan kompetensi seluruh pegawai lebih maksimal dan nantinya akan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan juga tengah berusaha secara optimal untuk meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

#### **3.3.4 Pemenuhan Sarana Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Salah satu prasarana yang penting adalah ketersediaan gedung/kantor dan peralatan kantor yang representatif sebagai tempat kerja utama. Saat ini, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan memiliki bangunan seluas 1.500 m<sup>2</sup> di atas lahan seluas 3.017 m<sup>2</sup>. Untuk saat ini status lahan masih milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan status Hak Pakai. Berdasarkan kebijakan Pemprov saat ini, proses hibah lahan belum dapat dilaksanakan karena lokasi lahan tempat berdirinya bangunan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan berada di dalam kompleks perkantoran milik Pemprov yang sertifikatnya menyatu dengan kantor lain, yaitu Taman Budaya (Disbudpar), Graha Teknologi (Disdik), dan Dekranasda. Namun demikian, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tetap berupaya untuk mengajukan peningkatan status menjadi kepemilikan sendiri (SHM).

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Sesuai dengan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan bidang kebahasaan dan kesastraan serta berdasarkan beberapa pernyataan pada bab-bab sebelumnya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menargetkan kinerja program 2020—2024. Pada bab ini sasaran dan indikator kinerja disajikan dalam dua periode pelaksanaan, yaitu sasaran dan indikator tahun 2020—2021 serta sasaran dan indikator tahun 2022—2024.

**4.1.1 Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021**

Sasaran dan indikator serta target kinerja Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020—2021 adalah sebagai berikut.

| Kode    | SK/IKK   | Satuan   | Angka Dasar | Target |      |
|---------|--|----------|-------------|--------|------|
|         |  |          |             | 2020   | 2021 |
| SK 1    | Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia  |          |             |        |      |
| IKK 1.1 | Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia  | Kosakata | 1000        | 1000   | 1100 |
| SK 2    | Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia  |          |             |        |      |
| IKK 2.1 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan melalui penelitian  | Dokumen  | 2           | 20     | 10   |
| SK 3    | Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik                                      |          |             |        |      |
| IKK 3.1 | Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina   | Lembaga  | 105         | 140    | 150  |
| SK 4    | Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina   |          |             |        |      |
| IKK 4.1 | Jumlah Tenaga Profesional dan Kemahiran Berbahasa dan Bersastra                              | Orang    | 1380        | 720    | 2000 |
| SK.5    | Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam                             |          |             |        |      |
| IKK 5.1 | Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah. | Orang    | 0           | 100    | 200  |
| IKK 5.2 | Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah. | Orang    | 130         | 400    | 500  |
| IKK 5.3 | Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan   | Sastra   | 0           | 0      | 2    |

|         |  |          |    |    |    |
|---------|--|----------|----|----|----|
| SK 6    | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan |          |    |    |    |
|         | Bahasa   |          |    |    |    |
| IKK 6.1 | Predikat SAKIP Satker minimal BB   | Predikat | B  | BB | BB |
| IKK 6.2 | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91                    | Nilai    | 91 | 92 | 92 |

#### 4.1.2 Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024

Sasaran dan indikator serta target kinerja Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022—2024 adalah sebagai berikut.

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  | Satuan   | Target Renstra |      |      |
|--|---|----------|----------------|------|------|
|  |   |          | 2022           | 2023 | 2024 |
| Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra                                    | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra  | Produk   | 2              | 2    | 2    |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | Orang    | 408            | 421  | 434  |
| Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                           | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                                      | Lembaga  | 45             | 45   | 45   |
|  | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                                      | Lembaga  | 30             | 30   | 30   |
| Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA   | Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)                           | Lembaga  | 5              | 5    | 5    |
| Tersedianya produk diplomasi bahasa  | Jumlah produk penerjemahan  | Produk   | 3              | 17   | 17   |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah      | Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah                               | Orang    | 22             | 23   | 23   |
| Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan                               | Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Selatan  | Predikat | BB             | BB   | BB   |
|  | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Sumatera Selatan         | Nilai    | 91             | 91   | 91   |

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Anggaran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari APBN. Kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020—2024 dibagi ke dalam tiga periode berikut ini.

## PERIODE TA 2020

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   | Rencana Pendanaan (ribuan) |
|----|---|--|----------------------------|
| 1  | Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia   | Jumlah KosaKata BahasaIndonesia  | 201.478                    |
| 2  | Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan Melalui Penelitian                        | 772.953                    |
| 3  | Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik                                     | Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina   | 494.186                    |
| 4  | Meningkatnya Jumlah PenuturBahasa Terbina   | Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra | 1.182.620                  |
| 5  | Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam                            | Jumlah Penutur Muda yangTerlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis danTerancam Punah        | 0                          |
|    |   | Jumlah Penutur Muda yangTerlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah       | 394.920                    |
|    |   | Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan   | 0                          |
| 6. | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Predikat SAKIP Satker minimal BB   | 275.000                    |
|    |   | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 91                               | 4.210.730                  |

## PERIODE TA 2021

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan  | Rencana Pendanaan (ribuan) |
|----|---|---|----------------------------|
| 1  | Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia   | Jumlah Kosa Kata BahasaIndonesia  | 250.000                    |
| 2  | Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan Melalui Penelitian                       | 950.000                    |
| 3  | Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik                                     | Jumlah Lembaga Pengguna BahasaIndonesia Terbina   | 320.000                    |
| 4  | Meningkatnya Jumlah PenuturBahasa Terbina   | Jumlah TenagaProfesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra | 2.500.000                  |
| 5  | Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam                            | Jumlah Penutur Muda yangTerlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis danTerancam Punah       | 350.000                    |
|    |   | Jumlah Penutur Muda yangTerlibat dalam Pelindunga Sastra Daerah Kritis danTerancam Punah        | 500.000                    |
|    |   | Jumlah ProdukKesastraan Terkembangkan   | 122.000                    |
| 6. | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Predikat SAKIP Satker minimal BB  | 275.000                    |
|    |   | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA- K/L Satker minimal 91                              | 4.350.000                  |

## PERIODE TA 2022-2024

| No | Sasaran Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Kegiatan                   | Rencana Pendanaan (ribuan) |         |         |
|----|---|--|----------------------------|---------|---------|
|    |   |  | 2022                       | 2023    | 2024    |
| 1  | Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra | 142.000                    | 146.260 | 150.648 |

|   |  |   |           |           |           |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|
| 2 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | 408.494   | 433.792   | 460.657   |
| 3 | Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                           | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                                      | 249.254   | 256.732   | 264.434   |
|   |  | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                                      | 190.500   | 196.215   | 202.101   |
| 4 | Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA   | Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing(BIPA)                            | 113.043   | 116.434   | 119.927   |
| 5 | Tersedianya produk diplomasi bahasa  | Jumlah produk penerjemahan  | 75.000    | 448.050   | 461.492   |
| 6 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah      | Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah                               | 128.006   | 135.933   | 1.084.651 |
| 7 | Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan                               | Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Selatan  | 550.194   | 935.500   | 963.565   |
|   |  | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Sumatera Selatan         | 5.584.084 | 6.260.000 | 6.280.000 |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020— 2024 disusun berdasarkan pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024, Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya (1) mengkaji dokumen yang relevan dengan upaya pengembangan (pengkajian) dan pembinaan (pemsyarakatan) bahasa dan sastra khususnya di Sumatera Selatan, dan pendidikan umumnya; (2) interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengkajian dan pemsyarakatan bahasa dan sastra baik di pusat maupun daerah; (3) menganalisis capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (4) penyusunan renstra. Terakhir, Renstra ini menjadi acuan bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Lampiran I : Matrik Perubahan (Semula-Menjadi) Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

| PERIODE 2020-2021 |  |          |          |      |      |                           |           | PERIODE 2022-2024 |   |          |      |      |      |                           |           |           |
|-------------------|--|----------|----------|------|------|---------------------------|-----------|-------------------|---|----------|------|------|------|---------------------------|-----------|-----------|
| KODE              | SK/IKK   | TARGET   |          |      |      | ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN) |           | KODE              | SK/IKK  | TARGET   |      |      |      | ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN) |           |           |
|                   |  | SATUAN   | BASELINE | 2020 | 2021 | 2020                      | 2021      |                   |   | SATUAN   | 2022 | 2023 | 2024 | 2022                      | 2023      | 2024      |
| <b>SK 1</b>       | Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia  |          |          |      |      |                           |           | <b>SK 1</b>       | Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra                                     |          |      |      |      |                           |           |           |
| <b>IKK 1.1</b>    | Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia  | Kosakata | 1000     | 1000 | 1100 | 201.478                   | 250.000   | <b>IKK 1.1</b>    | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra  | Produk   | 2    | 3    | 3    | 142.000                   | 213.000   | 213.000   |
| <b>SK 2</b>       | Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia  |          |          |      |      |                           |           | <b>SK 2</b>       | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan  |          |      |      |      |                           |           |           |
| <b>IKK 2.1</b>    | Jumlah Rekomendasi Kebijakan melalui penelitian  | Dokumen  | 2        | 20   | 10   | 772.953                   | 950.000   | <b>IKK 2.1</b>    | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | Orang    | 408  | 1000 | 1000 | 408.494                   | 1.200.000 | 1.200.000 |
| <b>SK 3</b>       | Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik                                      |          |          |      |      |                           |           | <b>SK 3</b>       | Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                            |          |      |      |      |                           |           |           |
| <b>IKK 3.1</b>    | Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina   | Lembaga  | 105      | 140  | 150  | 494.186                   | 320.000   | <b>IKK 3.1</b>    | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                                      | Lembaga  | 34   | 45   | 45   | 249.254                   | 450.000   | 450.000   |
| <b>SK 4</b>       | Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina   |          |          |      |      |                           |           | <b>IKK 3.2</b>    | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                                      | Lembaga  | 30   | 100  | 100  | 190.500                   | 635.000   | 635.000   |
| <b>IKK 4.1</b>    | Jumlah Tenaga Profesional dan Kemahiran Berbahasa dan Bersastra                              | Orang    | 1380     | 720  | 2000 | 1.182.620                 | 2.500.000 | <b>SK 4</b>       | Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA  |          |      |      |      |                           |           |           |
| <b>SK 5</b>       | Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam                             |          |          |      |      |                           |           | <b>IKK 4.1</b>    | Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing(BIPA)                            | Lembaga  | 5    | 5    | 5    | 113.043                   | 150.000   | 150.000   |
| <b>IKK 5.1</b>    | Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah. | Orang    | 0        | 100  | 200  | 0                         | 350.000   | <b>SK 5</b>       | Tersedianya produk diplomasi bahasa   |          |      |      |      |                           |           |           |
| <b>IKK 5.2</b>    | Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah. | Orang    | 130      | 400  | 500  | 394.920                   | 500.000   | <b>IKK 5.1</b>    | Jumlah produk penerjemahan  | Produk   | 3    | 5    | 5    | 75.000                    | 125.000   | 125.000   |
| <b>IKK 5.3</b>    | Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan   | Sastra   | 0        | 0    | 2    | 0                         | 122.000   | <b>SK 6</b>       | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah        |          |      |      |      |                           |           |           |
| <b>SK 6</b>       | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  |          |          |      |      |                           |           | <b>IKK 6.1</b>    | Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah                                | Orang    | 22   | 100  | 100  | 128.006                   | 581.000   | 581.000   |
| <b>IKK 6.1</b>    | Predikat SAKIP Satker minimal BB   | Predikat | B        | BB   | BB   | 275.000                   | 275.000   | <b>SK 7</b>       | Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan                                |          |      |      |      |                           |           |           |
| <b>IKK 6.2</b>    | Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91                            | Nilai    | 91       | 92   | 92   | 4.210.730                 | 4.350.000 | <b>IKK 7.1</b>    | Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Selatan  | Predikat | BB   | BB   | BB   | 550.194                   | 550.194   | 550.194   |
|                   |  |          |          |      |      |                           |           | <b>IKK 7.2</b>    | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Sumatera Selatan         | Nilai    | 91   | 92   | 92   | 5.584.084                 | 6.260.000 | 6.280.000 |

BALAI BAHASA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Badan Bahasa  
Bermartabat  
Bermanfaat

# Definisi Operasional Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

BALAI BAHASA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

 [balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id](http://balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id)

 [balaibahasaprovsumsel](https://www.instagram.com/balaibahasaprovsumsel)

 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>SK 1</b>         | <b>TERSEDINYA PRODUK PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>   |
| <b>IKK 1.1</b>      | <b>JUMLAH PRODUK PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>   |
| <b>Definisi</b>     | <p>Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.</p> <p>Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra).</p> <p>Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.</p> |
| <b>Metode</b>       | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Balai Bahasa  |
| <b>Penghitungan</b> | Provinsi Sumatera Selatan pada tahun tertentu.  |
|                     | Satuan : Produk   |
|                     | Tipe Penghitungan : Kumulatif   |
|                     | Periode Pengumpulan Data : Tahunan  |
|                     | Sumber Data: Laporan Internal   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| SK 2                | <p style="text-align: center;"><b>MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM GERAKAN LITERASI KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN</b></p>   |
| IKK 2.1             | <p style="text-align: center;"><b>JUMLAH PENUTUR BAHASA YANG TERBINA MELALUI PROGRAM LITERASI KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN</b></p>  |
| <b>Definisi</b>     | <p>Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.</p> <p><b>Penutur Bahasa Indonesia</b> adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.</p> <p><b>Manfaat pembinaan</b> ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.</p> |
| <b>Metode</b>       | Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa  |
| <b>Penghitungan</b> | <p>Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut:</p> $JPT = \sum P$ <p>Keterangan:</p> <p>JPT = Jumlah Penutur terbina</p> <p>P = Peserta kegiatan</p> <p>Satuan : Orang</p> <p>Tipe Penghitungan : Nonkumulatif</p> <p>Periode Pengumpulan Data : Tahunan</p> <p>Sumber Data: Laporan Internal</p>  |

---

**SK 3** **TERBINANYA LEMBAGA DALAM PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN**

---

**IKK 3.1** **JUMLAH LEMBAGA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASANYA**

---

**Definisi** Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

---

**Metode** Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = \sum L$$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina

L = Lembaga yang dibina

Satuan : Lembaga

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Sumber Data: Laporan Internal

---

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>SK 3</b>                | <b>TERBINANYA LEMBAGA DALAM PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN</b>  |
| <b>IKK 3.2</b>             | <b>JUMLAH KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI YANG TERBINA</b>  |
| <b>Definisi</b>            | <p>Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat.</p> <p>Bentuk pembinaan yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan.</p> <p>Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.</p> |
| <b>Metode Penghitungan</b> | <p>Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Satuan : Lembaga</p>  |

---

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Sumber Data: Laporan Internal

---

---

SK 4

MENINGKATNYA JUMLAH PEMELAJAR BIPA

IKK 4.1

JUMLAH PEMELAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING  
(BIPA)

---

**Definisi**

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri.

**Pemelajar BIPA** adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

---

**Metode**

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan melalui lembaga.

**Penghitungan**

Satuan : Orang

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Sumber Data: Laporan Internal

---



---

SK 5

TERSEDIANYA PRODUK DIPLOMASI BAHASA

---

IKK 5.1

JUMLAH PRODUK PENERJEMAHAN

---

**Definisi**

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya).

Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

---

**Metode**

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Balai Bahasa

**Penghitungan**

Provinsi Sumatera Selatan.

Satuan : Produk

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Sumber Data: Laporan Internal

---

---

SK 6

MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

---

IKK 6.1

JUMLAH PARTISIPAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA  
DAERAH

---

**Definisi**

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

---

---

Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Metode Penghitungan</b> | Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. |
|----------------------------|---|

---

---

$$A = B + C$$

Keterangan:

A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

$$B = M + N$$

Keterangan:

B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa

M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi Bahasa

$$C = X + Y$$

Keterangan:

C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan : Orang

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Sumber Data: Laporan Internal

---

**IKK 7.1                    PREDIKAT SAKIP BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Definisi**                    Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", termasuk Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel

**Metode**                    Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

**Penghitungan**                    
$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

| Nilai      | Predikat | Interpretasi     |
|------------|----------|------------------|
| > 90 - 100 | AA       | Sangat Memuaskan |
| > 80 - 90  | A        | Memuaskan        |
| > 70 - 80  | BB       | Sangat Baik      |
| > 60 - 70  | B        | Baik             |
| > 50 - 60  | CC       | Cukup (memadai)  |
| > 30 - 50  | C        | Kurang           |
| 0 - 30     | D        | Sangat Kurang    |

Satuan : Persen

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Sumber Data: Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek

**Definisi**

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yaitu:

Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA) IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%.

Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

**Metode**

***Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]***

**Penghitungan**

Sesuai dengan PMK, NKA dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut.

>90% Sangat Baik      >50%-60% Kurang

>80%-90% Baik      <50% Sangat Kurang

>60%-80% Cukup

---

Satuan : Nilai

Tipe Penghitungan : Kumulatif

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Sumber Data: Aplikasi (SMART DJA dan OM SPAN)

---

Lampiran III : Cascading PK Tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

CASCADING PK TAHUN 2022  
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

| Sasaran Kegiatan   | IKK   | Target IKK                                   | KRO  | RO  | Komponen   | Target DIPA/RKAKL |               |
|--|---|--|--|---|--|-------------------|---------------|
|  |   |  |  |   |  | Fisik             | Anggaran      |
| Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra                                    | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra  | 2 Produk                                     | 2021.DDA Penelitian dan Pengembangan Produk  | 2021.DDA.001 Produk Kodifikasi Bahasa                             | 52 Pemerikayaan Kosakata<br>53 Pengembangan Kamus  | 2 Produk          | 142.000.000   |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | 408 Orang                                    | 2021.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 2021.QDC.002 partisipan perlindungan sastra                       | 051 Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model perlindungan sastra daerah<br>052 Pemberdayaan pelaku sastra dalam mengimplementasikan model perlindungan sastra daerah | 22 Orang          | 128.006.000   |
| Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                           | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                                      | 34 Lembaga                                   | 2022.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga    | 2022.BDB.001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan | 051 Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum<br>053 Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik  | 34 Lembaga        | 249.254.000   |
|  | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                                      | 30 Lembaga                                   | 2022.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga    | 2022.BDB.002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina                 | 51 Pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi<br>52 Pemberdayaan komunitas penggerak literasi  | 30 Lembaga        | 190.500.000   |
| Meningkatnya jumlah pelajar BIPA   | Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing(BIPA)                              | 55 Orang                                     | 2022.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 2022.QDC.001 Penutur bahasa terbina                               | 54 Peningkatan Kemahiran Berbahasa<br>55 Peningkatan Apresiasi Sastra  | 278 Orang         | 209.333.000   |
|  |   |  | 6702.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga    | 6702.QDC.002 Penutur bahasa teruji                                | 051 Penyusunan Instrumen UKBI Adapatif Merdeka   | 80 Orang          | 65.398.000    |
|  |   |  | 6702.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga    | 6702.QDB.001 Lembaga Terfasilitasi Program BIPA                   | 054 Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA  | 5 Lembaga         | 113.043.000   |
| Tersedianya produk diplomasi bahasa  | Jumlah produk penerjemahan  | 3 Produk                                     | 6702.DDA Penelitian dan Pengembangan Produk  | 6702.DDA.001 Produk Penerjemahan                                  | 052 Pelaksanaan Penerjemahan   | 3 Produk          | 75.000.000    |
| Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah      | Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah                               | 22 Orang                                     | 2022.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat | 2022.QDC.003 Generasi muda terbina program literas                | 051 Pemilihan Duta Bahasa penggerak literasi   | 50 Orang          | 133.763.000   |
| Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan                               | Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Selatan  | Predikat BB                                  | 2020.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran                                  | 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor  | 1 Layanan         | 936.336.000   |
|  |   |  |  | 2020.EBA.962 Layanan Umum   | 51 Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan  | 1 Layanan         | 215.964.000   |
|  |   |  |  |   | 52 Pelayanan Perpustakaan  | 1 Layanan         | 15.000.000    |
|  |   |  |  |   | 53 Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal   | 1 Layanan         | 79.730.000    |
|  | 056 Pelayanan.SDM   | 1 Layanan                                    | 92.000.000                                   |   |  |                   |               |
| Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Sumatera Selatan        | Nilai 91  | 2020.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | 2020.EBA.962 Layanan Umum                    | 2020.EBA.962 Layanan Umum   | 054 Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan  | 1 Layanan         | 147.500.000   |
|  |   |  | 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran             | 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran                                  | 001 Gaji dan Tunjangan   | 1 Layanan         | 4.097.524.000 |



**PENJABARAN (CASCADING) SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA  
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020–2024**

| Sasaran Strategis  | IKSS   | Sasaran Program  | IKP  | Sasaran Kegiatan   | IKK   | Target IKK   | KRO   | RO   |
|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| Meningkatnya kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan  | Indeks kemahiran berbahasa Indonesia         | Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan  | Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya               | Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra                                    | Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra  | 2 Dokumen  | 2021.QMA Data dan Informasi Publik  | 2021.QMA.001 Produk Kodifikasi Bahasa  |
|  |  |  |  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan | Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan | 672 Orang  | 2022.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  | 2022.QDC.001 Penutur bahasa terbina<br>2022.QDC.002 Penutur bahasa teruji<br>2022.QDC.003 Generasi muda terbina program literasi |
|  |  | Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional  | Persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya                     | Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan                           | Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya                                      | 45 Lembaga   | 2022.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga   | 2022.BDB.001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan  |
|  |  |  |  | Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA   | Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina                                      | 30 Lembaga   | 2022.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga   | 2022.BDB.002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina  |
|  | Indeks pembangunan kebudayaan                | Meningkatnya kelestarian bahasa daerah   | Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya   | Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia                                      | Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)                           | 55 Pemelajar   | 6702.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga   | 6702.QDB.001 Lembaga Terfasilitasi Program BIPA  |
|  |  |  |  | Tersedianya produk diplomasi bahasa  | Jumlah produk penerjemahan  | 17 Dokumen   | 6702.BMA Data dan Informasi Publik  | 6702.BMA.001 Produk Penerjemahan   |
|  |  |  |  | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah      | Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah                               | 251 Orang  | 2021.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat  | 2021.QDC.001 Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra  |
|  |  |  |  |  |   |  |   | 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran   |
| Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel | Predikat SAKIP Kemendikbudristek             | Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi | Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa   | Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Sumatera Selatan                               | Predikat SAKIP Balai Bahasa Sumatera Selatan  | Predikat BB  | 2020.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal  | 2020.EBA.962 Layanan Umum  |
|  |  |  |  |  |   |  |   | 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran   |
|  | Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikburistek  | Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM | Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Sumatera Selatan        | Nilai 91  | 2020.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>2020.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 2020.EBA.962 Layanan Umum<br>2020.EBA.994 Layanan Perkantoran<br>2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal |  |

Palembang, 1 Maret 2023  
Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan,



*[Handwritten Signature]*

Karyono, S.Pd., M.Hum.